

Nomor : AG/MTI/CORSEC/EXT/V/2019  
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Jakarta, 31 Mei 2019

**Kepada Yth.**

**Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Kementerian Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur  
Jakarta - 10710**

**Up. Yth: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Mora Telematika Indonesia Tahun 2019**

*Bahwa surat yang kami sampaikan ini dibuat berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Surabaya Nomor I.A.3 tentang Kewajiban Pelaporan Emiten (untuk selanjutnya disebut “IDX IA3”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 31”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 7”), dan juga sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi 1 Moratelindo Tahun 2017 nomor 65, tertanggal 25 September 2017, sebagaimana telah diubah melalui Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo tahun 2017, nomor 38, tertanggal 18 Oktober 2017, keseluruhannya dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, dimana perubahan terakhir melalui Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo tahun 2017, nomor 56, tertanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Dina Chozie, SH., Notaris pengganti dari Notaris Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta (“PWA”).*

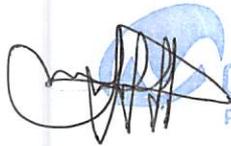
Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam IDX IA3, POJK 31, POJK 7, dan PWA, selanjutnya dengan ini kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait bukti iklan Ringkasan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mora Telematika Indonesia tahun 2019 yang dimuat dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional Investor Daily halaman 7 tertanggal 31 Mei 2019.

Adapun apabila terdapat informasi yang dibutuhkan mengenai surat ini terkait isu hukum, mohon untuk menghubungi Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078 - henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id) dan informasi mengenai isu keuangan dan akuntansi, mohon untuk menghubungi Bapak Genta Andika Putra (081287667934 - genta.putra@moratelindo.co.id).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,  
**PT Mora Telematika Indonesia**



**Moratelindo**  
PT. Mora Telematika Indonesia

---

Nama : **Henry Rizard Rumopa**  
Jabatan : Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

1. **Yth. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia**
2. **Yth. PT Bank Mega Tbk, selaku Wali Amanat**

# Pemerintah Kaji Harga Referensi CPO Domestik

Oleh **Damiana Simanjuntak**

► **JAKARTA** – Pemerintah tengah mengkaji pembentukan harga referensi untuk pasar minyak sawit di dalam negeri. Dengan begitu, ke depan Indonesia tidak perlu lagi mengandalkan harga acuan Rotterdam dalam penyusunan kebijakan bea keluar (BK) maupun pungutan ekspor (PE) minyak sawit. Proses studi pembentukan harga referensi tersebut segera dilakukan dengan dipimpin oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, Indonesia mengkaji kemungkinan pembentukan harga referensi untuk pasar minyak sawit. Dengan begitu, Indonesia tidak lagi mengandalkan harga acuan Rotterdam. Wacana tersebut menjadi salah satu topik pembahasan dalam rapat Komite Pengarah BPDPKS di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (29/5). "Rapat belum ada keputusan, yang dibahas salah satunya mengenai pungutan, belum ada usulan juga. Yang jelas, rapat melihat ada banyak persoalan yang perlu diklarifikasi, di antaranya apakah kita masih akan pakai harga acuan Rotterdam? Mengapa tidak (menggunakan harga acuan) domestik?" kata Sahat di Jakarta, kemarin.

Untuk itu, kata Sahat, akan dilakukan studi untuk hal tersebut (pembentukan harga acuan/referensi minyak sawit domestik). Studi dilakukan maksimal dua bulan dengan tim yang akan ditunjuk oleh BPDPKS. "Studi itu untuk mencari jalan keluar, melihat kebutuhan petani dan pasar, baik di Eropa,

India, maupun Tiongkok. Tujuannya kemudian adalah bagaimana konsep kita dengan penganan *levy* (pajak/PE) minyak sawit BPDPKS sementara hilirisasi tetap jalan. Katanya, studinya dilakukan maksimal dua bulan, setelah itu baru akan ada kebijakan baru (atau sebeluknya)," kata Sahat.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN/Inacom) Edward S Ginting mengatakan, Indonesia seharusnya sudah dapat menentukan harga referensi. Padahal, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar dunia. "Sebagai produsen terbesar sawit dunia, Indonesia belum bisa independen dan bergantung pada harga internasional, seperti Bursa Rotterdam dan Malaysia Derivatives Exchange (MDEX)," ungkap Edward.

Menurut Edward, kondisi tersebut tentu sangat ironis. Volume minyak sawit terbesar ada di Indonesia, namun penentuan harganya bergantung ke Malaysia. Karena itu, begitu Malaysia mengenakan pajak nol persen, harga minyak sawit di Indonesia langsung turun. "Padahal, itu *kan* harga kertas,

bukan fisik. Sawit adalah harta karun kita, harusnya kita jaga, kalau *nggak* (dijaga dengan harga referensi atau acuan) akan dikerjain *trader*," kata Edward.

KPBN sendiri berambisi meningkatkan volume perdagangan minyak sawitnya hingga 2-3 kali lipat, tahun ini ditargetkan mencapai 1,80 juta ton. Upaya tersebut dilakukan dengan menambah pemasok, artinya KPBN tidak lagi hanya memasarkan hasil produksi dari PTPN Group tapi juga produsen minyak sawit swasta di Indonesia. Dengan penambahannya itu, diharapkan KPBN bisa membentuk harga acuan di pasar. KPBN adalah anak usaha PTPN Group yang bergerak sebagai agen perdagangan atau pemasaran dan baru saja melakukan *rebranding* menjadi Inacom.

## Produk Hilir

Di sisi lain, lanjut Sahat, PT Pertamina (Persero) diharapkan segera menjalankan proyek pengembangan bihidrokarbon. Dengan begitu, serapan minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) akan melonjak signifikan dan menopang hilirisasi minyak sawit di Tanah Air. Hal itu menjadi salah satu strategi dalam mengatasi ketergantungan Indonesia terhadap pasar ekspor minyak sawit. "Yang sudah dan akan jalan itu *co-processing* (pencampuran langsung CPO dan minyak fosil) adalah di Kilang Dumai (diesel nabati, Juli 2019), Kilang Plaju (bensin nabati, Juli 2019), dan Kilang Cilacap (avtur nabati, mulai September 2019)," kata Sahat.

Apalagi, lanjut dia, saat ini minyak sawit Indonesia kalah bersaing dengan Malaysia. Di pasar ekspor utama India, selisih harga CPO Indonesia dengan Malaysia untuk saat ini sudah mencapai US\$ 27 per ton dengan dikenakannya tarif 5%. "Malaysia sekarang tetap bisa mengekspor CPO, untuk menjalankan industri hilirnya Malaysia membeli CPO dari Indonesia," ujar Sahat.

## Bulog Pastikan Stok Beras Aman Jelang Lebaran

**JAKARTA** – Perum Bulog memastikan stok beras dan beberapa kebutuhan pokok lainnya aman untuk memenuhi kebutuhan Lebaran bahkan hingga akhir 2019 dan panen selanjutnya. "Sangat cukup. Stok kita dua juta ton. Sampai Desember masih cukup, bahkan sampai panen berikutnya," kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh di Jakarta, Kamis (30/5).

Bulog juga masih menyerap gabah 10-15 ribu ton per hari di seluruh Indonesia, mengingat beberapa daerah masih panen. Tri Wahyudi juga mengatakan bahwa stok untuk gula, tepung, dan minyak goreng juga dalam kondisi aman untuk mengintensifkan pasar jika diperlukan setiap saat. "Kemarin kami lihat di Pasar Minggu, Jakarta, kami dapat informasi harga gula Rp 12.800 per kilogram (kg) langsung kami gelontorkan di sana. Alhamdulillah turun," kata dia seperti dilansir *Antara*.

Selain itu, kata dia, stok daging sapi juga relatif aman, di mana Bulog mematok harga tertinggi Rp 80 ribu per kg untuk daging sapi. "Kami cek di Jawa Timur dan Jawa Barat itu ada yang Rp 110 ribu per kg, *nah* itu bukan daging Bulog," ujar Tri.

Sementara itu, untuk menjaga kualitas beras yang stoknya tersimpan di gudang, Bulog menjalankan standar operasional dan prosedur (SOP) secara tertib. Setiap pekan, pihaknya melakukan pemeriksaan kualitas, salah satunya membuka gudang setiap pagi untuk memastikan kualitas sirkulasi udara terjaga dengan baik. "Kami juga melakukan pengendalian hama gudang terpadu setiap saat. Bulog membersihkan lingkungan di dalam dan di luar gudang serta membuka pintu gudang setiap pagi dan sore untuk menjaga sirkulasi udara." "Kita juga berharap Bulog ke depan masih terus dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga pemerintah yang mengemban tugas untuk stabilisasi pangan. "Kita juga berharap Bulog ke depan masih terus dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga pemerintah yang mengemban tugas untuk stabilisasi pangan. Sekaligus memperkenalkan instansi kita agar mereka percaya. Jadi, ingat beras ingat Bulog," ujar Tri.

Selain bus, Bulog telah memberangkatkan penumpang dengan kapal laut dan pada Sabtu (1/6) akan memberangkatkan penumpang dengan kereta api, serta pesawat udara. "Ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat sekitar. Intinya kami siapkan dan insyaallah kita memberikan yang terbaik buat masyarakat. Semoga aman dan lancar," kata dia. (t)

Dia menjelaskan program yang diikuti 140 BUMN itu merupakan agenda rutin perusahaan untuk mempermudah masyarakat dalam menjangkau

transportasi mudik yang biasanya padat. "Kami melihat masyarakat yang bekerja di Jakarta dan ingin berkumpul bersama keluarga di kampung halaman itu begitu sulit mendapat transportasi, karena waktu liburanya juga terpotong. Jadi saya kira, dengan difasilitasi BUMN, kami ingin memberi keringanan," kata dia.

Tri berharap, dengan mengikuti program BUMN Mudik Bareng itu, masyarakat masih bisa mengenal eksistensi Bulog sebagai lembaga pemerintah yang mengemban tugas untuk stabilisasi pangan. "Kita juga berharap Bulog ke depan masih terus dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga pemerintah yang mengemban tugas untuk stabilisasi pangan. Sekaligus memperkenalkan instansi kita agar mereka percaya. Jadi, ingat beras ingat Bulog," ujar Tri.

Selain bus, Bulog telah memberangkatkan penumpang dengan kapal laut dan pada Sabtu (1/6) akan memberangkatkan penumpang dengan kereta api, serta pesawat udara. "Ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat sekitar. Intinya kami siapkan dan insyaallah kita memberikan yang terbaik buat masyarakat. Semoga aman dan lancar," kata dia. (t)



## RUPS BISI

Direktur Utama PT BISI International Tbk Jemmy Eka Putra (ketiga kanan) dan Komisaris Utama Tjiu Thomas Effendy (ketiga kiri), berbincang bersama (dari kiri) Direktur Agus Saputra Wijaya, Komisaris Ong Mei Sian, Komisaris Independen Burhan Hidayat dan Direktur Joseph Suprijanto, usai Rapat Umum Pemegang Saham, di Jakarta, Selasa (28/5/2019). Dalam RUPST tersebut disepakati PT BISI, produsen bibit hibrida untuk tanaman jagung, padi dan hortikultura serta produsen pestisida dan distributor pupuk, akan membagikan dividen tunai sebesar Rp100 per saham atau 74,29 persen dari laba tahun berjalan atau seluruhnya sebesar Rp300 miliar.

## RI Ekspor Perdana Ikan Patin ke Arab Saudi

**JAKARTA** – Indonesia untuk pertama kalinya mengekspor 63 ton ikan patin (*Pangasius hypophthalmus*) ke Arab Saudi guna memenuhi kebutuhan makanan jemaah haji asal Tanah Air. Peluncuran ekspor perdana itu dilepaskan di Instalasi Karantina Puspa Agro Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin (27/5). Ikan patin dibutuhkan untuk menunjang pelayanan bagi jemaah haji sebagai sajian menu masakan bercita rasa khas Indonesia.

Peluncuran ekspor perdana itu disaksikan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo, Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjanto, Staf Ahli Menteri Luar Negeri bidang Diplomasi Ekonomi Ima Hagniningtyas Krisnamurthi, Kepala Dinas KP Provinsi Jawa Timur Mohammad Gunawan Saleh, dan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Muhajirin Yanis. Turut hadir Ketua MUI KH Abdul Somad Buchori, Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP KKP Machmud, Kepala Pusat Pengendalian Mutu BKIPM KKP Widodo Sumianto, Sekjen Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia (APCI) Azam B Zaidy, serta Ketua bidang Budidaya Patin APCI Imza Hermawan.

Nilanto mengatakan, produksi ikan patin hasil budidaya selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Sejalan dengan peningkatan produksi di dalam negeri, produksinya yang semakin meningkat, kini ikan patin Indonesia dapat diekspor ke Arab Saudi. "Ekspor perdana ini adalah hasil kerja sama APCI dan SMART-Fish Indonesia yang menangkan potensi patin Indonesia untuk memenuhi kebutuhan ikan jemaah haji Indonesia," kata Nilanto di Jakarta, kemarin.

Saat ini, tutur dia, kebutuhan ikan patin untuk jemaah haji Indonesia diperkirakan mencapai 540 ton. Untuk memenuhi kebutuhan itu, APCI telah menyiapkan pasokan sekitar 300 ton patin yang terdiri dari 150 ton *cut portion* dan 150 ton *fillet*. Sementara, untuk ekspor perdana, telah dikirim sekitar 63 ton, pengiriman sisa volumenya akan dilakukan secara bertahap. "Ekspor ikan patin ini memang baru untuk kebutuhan jemaah haji. Kami berharap, dengan ekspor perdana ini nantinya bisa merambah ke negara-negara lain," ujar dia.

Muhajirin Yanis menambahkan, ikan patin dibutuhkan untuk menunjang pelayanan bagi jemaah haji sebagai sajian menu masakan bercita rasa khas Indonesia. "Tahun ini, sajianya akan semakin lengkap dengan tersedianya bahan baku ikan patin asli Indonesia. Nantinya, selama jemaah haji Indonesia berada di Arab Saudi, sajian makan kurang lebih sebanyak 75 kali makan sampai mereka kembali yang mana lima kali dalam seminggu mencicipi sajian menu ikan patin," kata Muhajirin.

KKP mencatat, produksi ikan patin Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Pada 2018, produksi ikan patin Indonesia meningkat 22,20% menjadi 391.151 ton dari 2017 yang hanya sebesar 319.966 ton. Sentra utama produksi patin Indonesia tersebar di wilayah Kabupaten Tulungagung di Jawa Timur, Kabupaten Serdang Bedagai di Sumatera Utara, Kabupaten Kampar di Riau, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi di Jambi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, dan

Kabupaten Pringsewu di Lampung, serta Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan.

Peningkatan hasil budidaya patin ini terjadi berkat upaya penggunaan induk dan benih yang berkualitas untuk menekan Feed Conversion Ratio (FCR), sehingga efisiensi produksi meningkat. Induk dan benih berkualitas faktor utama penentu kesuksesan budidaya. "FCR bisa ditekan apabila benih yang digunakan juga berkualitas," ungkap Imza Hermawan.

## Pasar Ekspor

Pada 2017, kata Nilanto dengan mengutip UN Comtrade 2019, permintaan impor *catfish* global mencapai 640.870 ton dengan pasar utama Amerika Serikat (17%), Meksiko (9%), Tiongkok (8%), Brasil (7%), dan Saudi Arabia (5%). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sebanyak 48% dipasok oleh Vietnam, 36% dari Myanmar, sedangkan sisanya dari negara lain. Pada 2018, total permintaan impor *catfish* global meningkat menjadi 641.310 ton. Dengan negara tujuan utama Amerika Serikat (19,08%) dan Tiongkok (18,97%). Sedangkan, permintaan impor Arab Saudi hanya sebesar 4.503 ton (0,70%) atau turun 85% dari 2017.

Nilanto menuturkan, melihat peluang tersebut maka KKP mendorong agar para pelaku usaha dan pembudidaya memacu produksi patin dalam negeri sehingga patin Indonesia bisa turut ambil bagian dalam memenuhi kebutuhan global. "Pangsa pasar ekspor untuk patin sudah sangat jelas. Dengan potensi patin dalam negeri yang sangat tinggi, apabila kita mampu menggenjot produksi, tidak mustahil ke depan kita bisa menjadi pemain utama untuk komoditas ikan patin," kata Nilanto. (eme)



Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia

Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882

Website: www.moratelindo.co.id

Email: corsec@moratelindo.co.id

## PENGUMUMAN RINGKASAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN UNTUK TAHUN BUKU 2018 PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TAHUN 2019 ("PERSEORAN")

Direksi PT Mora Telematika Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseoran") dengan ini menyampaikan ringkasan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

Hari : Rabu, 29 Mei 2019

Waktu : Pukul 10.00 WIB

Tempat : Kantor Pusat Perseoran, Grha 9 Lt. 6, Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta Pusat 10320

**Pemenuhan Prosedur Hukum Untuk Penyelenggaraan Rapat:**

1. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan website Perseoran pada tanggal 9 Mei 2019;

2. Pengumuman dan Panggilan Rapat kepada para pemegang saham melalui surat tercatat dan surat kabar harian Ekonomi Neraca pada tanggal 14 Mei 2019;

**Pemegang Saham Yang Hadir:**

100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseoran yang terdiri dari:

1. PT Gema Lintas Benua selaku pemilik atau pemegang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A;

2. PT Candrakarya Multirealisasi selaku pemilik atau pemegang dari 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B.

**Pimpinan Rapat:**

Tuan Colubang Menak, sebagai Direktur Utama Perseoran.

**Mata Acara Rapat:**

1. **ACARA PERTAMA.** Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan Perseoran termasuk laporan keuangan Perseoran yang memuat neraca dan laporan laba rugi Perseoran, laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

2. **ACARA KEDUA.** Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

3. **ACARA KETIGA.** Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut;

4. **ACARA KEEMPAT.** Persetujuan atas rencana kerja Perseoran selama tahun buku 2019;

5. **ACARA KELIMA.** Persetujuan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran untuk tahun buku 2019.

**Keputusan Rapat:**

Peserta Rapat dengan suara bulat menyetujui keputusan sebagai berikut:

1. **ACARA PERTAMA.** Menyetujui dan menerima dengan baik isi laporan Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseoran untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseoran untuk Tahun Buku 2018. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseoran untuk tahun buku 2018 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseoran tahun buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sainsi Idris, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan No. 090/2.1060/AU.1/08/0153-11/III/2019 tertanggal 28 Februari 2019.

2. **ACARA KEDUA.** Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan laba bersih yang diperoleh Perseoran selama tahun buku 2018 akan dipergunakan sebagai berikut:

a. Disisihkan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas;

b. Sisa laba tahun buku 2018 sebesar Rp. 180.625.183.952,- (seratus delapan puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah) akan dicatat sebagai laba ditahan Perseoran yang penggunaannya untuk mendukung operasional dan Pengembangan usaha Perseoran.

3. **ACARA KETIGA.** Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseoran yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseoran untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

4. **ACARA KEEMPAT.** Menyetujui Rencana Kerja Perseoran selama tahun buku 2019;

5. **ACARA KELIMA.** Menyetujui dan menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan/remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseoran untuk Tahun buku 2019 yaitu untuk anggota Direksi sebanyak Rp. 11.254.164.402,- (sebelas miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus dua Rupiah) dan untuk Dewan Komisaris sebanyak Rp. 2.580.412.368,- (dua miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh delapan Rupiah).

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseoran dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Rapat ini, dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan-keputusan yang tercantum dalam Rapat ini, seluas-luasnya tanpa ada yang dicegah, termasuk tetapi tidak terbatas pada, membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian dan/atau akta yang diperlukan serta menyatakan kembali keputusan dalam Rapat ini, baik keputusan maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang termasuk notaris, melakukan pelaporan, pendaftaran dan/atau mengajukan permohonan persetujuan kepada dan/atau dari pihak yang berwenang dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.